

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sungai merupakan sumber air yang memiliki banyak fungsi bagi seluruh umat manusia. Mengingat pentingnya peran sungai dalam memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup, pelestarian sungai menjadi sangat diperlukan (Muhjad, 2015). Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 menjelaskan definisi sungai sebagai alur atau wadah air, baik alami maupun buatan, yang berupa jaringan aliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu hingga ke muara, dan dibatasi oleh garis sempadan di kedua sisi kanan dan kiri. Sungai merupakan ekosistem yang memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan, masyarakat sering memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari (Suarnawati & Dahliani, 2022). Pemanfaatan sungai yang tidak sesuai dengan fungsinya menyebabkan kerusakan pada ekosistem sungai maupun lingkungan sekitar sehingga menimbulkan permasalahan seperti banjir (Diniarti, 2021).

Banjir terjadi ketika volume aliran air sungai meningkat secara signifikan dari kondisi normal. Ketika kapasitas sungai tidak mampu menampung aliran tersebut, air meluap ke luar sungai dan membanjiri area sekitarnya (Setiawan et al., 2022). Banjir dapat dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, faktor alam, seperti intensitas curah hujan, proses erosi dan sedimentasi, kondisi topografi dan geofisika sungai, kapasitas aliran sungai dan drainase yang tidak mencukupi, penurunan permukaan tanah, serta kerusakan pada infrastruktur pengendali banjir. Kedua, faktor yang berasal dari aktivitas manusia, termasuk perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah sembarangan, keberadaan kawasan kumuh di sepanjang bantaran sungai, serta

perencanaan sistem pengendalian banjir yang kurang tepat (Razikin et al., 2017). Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa permasalahan banjir tidak hanya berkaitan dengan aspek alam, tetapi juga perilaku manusia dan pengelolaan infrastruktur.

Kondisi geografis seperti keberadaan dataran rendah yang terletak di dekat pantai atau muara sungai juga berkontribusi pada terjadinya banjir. Dataran rendah umumnya memiliki elevasi yang lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air laut, sehingga aliran air menjadi lambat atau bahkan terhambat. Kondisi ini semakin diperburuk oleh adanya tekanan air laut, terutama saat pasang, yang menyebabkan air sulit mengalir ke laut dan justru meluap ke wilayah permukiman (Ronga et al., 2024). Faktor ini membuat daerah dataran rendah sangat rentan terhadap banjir, terutama jika tidak ada upaya mitigasi yang memadai, seperti peninggian tanggul, perbaikan sistem drainase, atau pengelolaan tata ruang yang mempertimbangkan kondisi geografis setempat (Alamsyah et al., 2022).

Berdasarkan kajian risiko bencana nasional provinsi Jawa Timur tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, daerah yang berisiko tinggi terhadap banjir meliputi Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Dalam kajian tersebut, Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai salah satu dari 12 kabupaten di Jawa Timur yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir. Banjir merupakan bencana *hidrometeorologi* yang sering terjadi di wilayah Sidoarjo. Secara topografis, Kabupaten Sidoarjo dapat dikaji berdasarkan ketinggian wilayah

dari permukaan laut serta tingkat kemiringan lereng. Berdasarkan kemiringannya, Sidoarjo tergolong sebagai daerah dataran rendah dengan tingkat kemiringan antara 0 hingga 2% (Dokumen Kontigensi Banjir kabupaten Sidoarjo Tahun 2019).

Untuk mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan revitalisasi sungai dan drainase dengan konsep *good environmental governance* sebagai upaya menjaga lingkungan yang tertuang pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik yang berbunyi “bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan”. Namun, untuk mengatasi permasalahan banjir tersebut tidak hanya perlu dilakukan oleh pemerintah saja, masyarakat pun harus ikut berperan aktif demi menjaga kelangsungan lingkungannya yakni sungai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revitalisasi diartikan sebagai suatu proses, metode, atau tindakan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya kurang optimal atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, revitalisasi merupakan suatu bentuk upaya untuk mengaktifkan kembali serta memperkuat peran dan fungsi suatu program atau kegiatan, sehingga menjadi lebih signifikan dan dibutuhkan (Kariem & Afrijal, 2021). Revitalisasi sungai merupakan usaha untuk memulihkan, memperbaiki, atau mengembalikan fungsi sungai yang mengalami kerusakan atau penurunan kualitas. Tujuan revitalisasi sungai untuk melestarikan ekosistem sungai, meningkatkan mutu air, mengurangi potensi banjir,

serta mengoptimalkan manfaat sungai bagi kehidupan manusia dan lingkungan (Suharko & Kusumadewi, 2019).

Environmental governance atau tata kelola lingkungan merupakan suatu bentuk interaksi antara berbagai aktor yang terlibat. Interaksi ini dapat berlangsung secara formal maupun informal dalam proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan. Tujuan dari interaksi ini adalah menanggapi tuntutan dan masukan masyarakat terkait isu lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan lingkungan (Ulum & Ngindana, 2017). *Good environmental governance* menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan semua aktor yang berpengaruh terhadap lingkungan. Kolaborasi dan kerja sama antara berbagai pihak menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, yang dapat mendukung peralihan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan (UNEP, 2009) dalam Ulum & Ngindana (2017).

Hubungan antara revitalisasi dan *good environmental governance* dalam upaya mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Sidoarjo terletak pada prinsip tata kelola lingkungan yang baik sebagai dasar pelaksanaan revitalisasi sungai. Revitalisasi sungai merupakan langkah strategis untuk memulihkan fungsi sungai yang telah mengalami degradasi, sehingga mengurangi risiko banjir, menjaga keseimbangan ekosistem, serta memperindah lingkungan. Dalam konteks revitalisasi sungai, penerapan *good environmental governance* memastikan bahwa proses perbaikan dan pengelolaan sungai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, revitalisasi sungai dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam

jangka panjang, baik untuk mitigasi banjir maupun untuk keseimbangan ekosistem sungai.

Kabupaten Sidoarjo memiliki kegiatan revitalisasi sungai yakni Program Sido Resik (Sidoarjo Revitalisasi Fungsi Kali) yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sampai dengan 2026 yang sejalan dengan asas manfaat yang tertuang pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan asas manfaat:

“asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya”.



Gambar 1.1 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Program prioritas ke 17 yakni perluas RTH (Ruang Terbuka Hijau), revitalisasi sungai, dan revolusi manajemen sampah merupakan langkah yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air atau sungai, dan permasalahan banjir. Program Sido Resik merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk meningkatkan kebersihan dan revitalisasi sungai dengan partisipasi aktif masyarakat. Program ini merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi sungai yang bertujuan untuk menjaga kebersihan sungai, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mengurangi risiko banjir.

Program Sido Resik melibatkan berbagai kegiatan, seperti pembersihan sampah di sungai, normalisasi aliran air, penghijauan bantaran sungai, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan pembuatan wisata berbasis sungai. Program ini melibatkan desa-desa dalam sebuah perlombaan di mana desa yang berhasil membersihkan dan memperindah sungainya dipilih sebagai pemenang. Tujuan utamanya adalah mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga fungsi sungai sebagai sumber air yang berkelanjutan, program ini bertujuan untuk menurunkan resiko banjir di Kabupaten Sidoarjo dan memperindah lingkungan sekitar.

Program Sido Resik juga bertujuan untuk menginspirasi kreativitas masyarakat dalam mengelola sungai sehingga selain bersih, sungai juga dapat memberi nilai ekonomis. Program Sido Resik berfokus pada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan sungai. Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Sido Resik, mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan di masyarakat Kota Delta, sebagaimana yang ada diberita:

"Program Sido Resik adalah program menjaga kebersihan sungai usai dilakukan normalisasi. Sido Resik tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja, peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder di Sidoarjo sangat diharapkan," kata Dwi Eko Saptono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. (Sumber: <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/469363/dwi-eko-saptono-program-sido-resik-kolaborasi-pemerintah-dan-masyarakat-sidoarjo>, diakses 22 November 2023)

Dwi Eko Saptono melanjutkan program Sido Resik dalam menjaga kebersihan sungai pasca-normalisasi memerlukan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan seluruh stakeholder di Sidoarjo. Partisipasi aktif semua pihak sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, sebagaimana yang ada diberita:

"Dengan program revitalisasi fungsi kali atau Sido Resik ini, masyarakat akan tumbuh kesadaran untuk ikut menjaga kebersihan, fungsi sungai di Desanya. Dan terpenting lagi pemanfaatan eduwisata sungai serta pemanfaatan kawasan sungai menjadi bernilai ekonomi bagi warga sekitar Sungai. Dukungan dan kolaborasi pemimpin di tingkat wilayah, Kepala Desa hingga Camat, kemudian PKK serta karang taruna dan kader lingkungan sangat dibutuhkan untuk tercapainya pelaksanaan program Sido Resik ini. Camat, Kepala Desa dan Ibu-ibu PKK memiliki peran penting mensukseskan program Sido Resik," sambung Dwi Eko. (Sumber: <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/469363/dwi-eko-saptono-program-sido-resik-kolaborasi-pemerintah-dan-masyarakat-sidoarjo>, diakses 22 November 2023)

Berdasarkan berita tersebut dapat diketahui bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif multi-aktor dalam menjaga kebersihan dan fungsi sungai yang sesuai dengan prinsip *good environmental governance*

dimana perlu keterlibatan multi-aktor yakni dari Pemerintah dan masyarakat. Selain itu, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan sungai, tetapi juga mengoptimalkan potensi sungai sebagai kawasan eduwisata dan sumber nilai ekonomi bagi warga sekitar. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemimpin wilayah, Kepala Desa, Camat, PKK, karang taruna, dan kader lingkungan, menjadi kunci utama dalam memastikan program Sido Resik berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Penilaian lomba Sido Resik ini didasarkan pada empat aspek utama yang mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

“Ada empat aspek dalam penilaian Sido Resik , satu aspek kelembagaan, dua obyek fisik saluran air, tiga kesadaran dan tanggung jawab masyarakat serta yang keempat aspek sosial ekonominya.” Ketua Juri Teknis Sido Resik yang juga Kepala Bidang Ketahanan Drainase Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Wahib Achmadi (Sumber: <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/476443/jelang-penjurian-akhir-10-nominasi-sido-resik-2023-harus-penuhi-4-aspek-ini>, diakses 2 Desember 2024)

Aspek kelembagaan menekankan pentingnya kolaborasi multi-aktor, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan dinas terkait, dalam menciptakan struktur pengelolaan yang mendukung keberlanjutan program. Aspek obyek fisik saluran air fokus pada pemeliharaan sungai, seperti membersihkan sampah, menghilangkan hambatan seperti tumbuhan liar, dan memastikan fungsi saluran air tetap optimal. Aspek kesadaran dan tanggung jawab masyarakat mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dan keberlanjutan pengelolaannya melalui gotong-royong dan edukasi lingkungan. Terakhir, aspek sosial ekonomi

mengevaluasi dampak program terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan wisata berbasis sungai dan pemberdayaan UMKM.

Program Sido Resik sudah diterapkan sebanyak 2 putaran yakni pada tahun 2021 dan 2023. Pada tahun 2021 putaran pertama pemenang lomba Sido Resik yakni Desa Candinegoro pemenang juara pertama, Desa Ketapang pemenang juara kedua, dan Desa Porong pemenang juara ketiga. Pada tahun 2022 program Sido Resik tidak diselenggarakan, akan tetapi digantikan dengan sosialisasi program Sido Resik. Pada tahun 2023 putaran kedua pemenang lomba Sido Resik yakni Desa Kedungcangkring pemenang juara pertama, Desa Gempolsari pemenang juara kedua, dan Desa Kemantren pemenang juara ketiga. Kemudian, Desa Penambangan menduduki harapan pertama, Desa Kalisampurno menduduki harapan kedua, dan Desa Sumorame menduduki harapan ketiga. Pada tahun 2024 ketiga lomba Sido Resik diselenggarakan namun dikolaborasikan dengan kegiatan fisik saluran. Terdapat 3 desa yang mendapatkan kegiatan saluran fisik yakni, Desa Kedungcangkring, Desa Gempolsari dan Desa Kemantren.

Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, sukses meraih juara pertama dalam Program Revitalisasi Fungsi Kali Sidoarjo atau Sido Resik putaran kedua dan berhasil menyisihkan sembilan desa lainnya yang menjadi nominasi dalam kompetisi tersebut. Pemenang Sidoarjo Revitalisasi Fungsi Kali secara langsung diumumkan oleh Bupati Sidoarjo. Keberhasilan Desa Kedungcangkring dalam meraih juara pertama tidak terlepas dari peran dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program revitalisasi

sungai, hal ini sejalan dengan hasil pra wawancara dengan Bapak Dani Eko Guntoro ,ST.,MT selaku staff Bidang Ketahanan Drainase, beliau mengatakan:

“Saya sarankan untuk penelitian mbak ya di Desa Kedungcangkring. Desa ini menang Program Sido Resik tahun 2023 karena memang adanya sinergitas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga terkait dukungan teknis, kemudian kerjasama antar Pemerintah desa dan dari warga desa itu sendiri, terus outputnya juga bagus, mbak bisa datang ke Kanal Mobil”
(Hasil pra wawancara dengan Bapak Dani Eko Guntoro ,ST.,MT selaku penanggungjawab Program Sido Resik pada tanggal 21 November 2024 di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo).

Desa Kedungcangkring merupakan representasi dari inovasi *non-digital* melalui Program Sido Resik (Sidoarjo Revitalisasi Fungsi Kali) dalam ajang *Innovation Government Award* (IGA) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Program ini merupakan terobosan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama kebersihan dan fungsi sungai. Program Sido Resik berhasil memenangkan penghargaan *Innovation Government Award* (IGA) dan turut menjadikan Kabupaten Sidoarjo meraih predikat sebagai Kabupaten Terinovatif dalam *Innovation Government Award* (IGA) 2024. Berkat kolaborasi dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Kedungcangkring melalui Program Sido Resik, Kabupaten Sidoarjo berhasil memenangkan penghargaan tersebut dan mengukuhkan sebagai contoh inovasi berbasis lingkungan di tingkat nasional. Berdasarkan keberhasilan yang telah dicapai oleh Desa Kedungcangkring dan saran dari Bapak Dani Eko Guntoro ,ST.,MT selaku staff Bidang Ketahanan Drainase dan penanggungjawab Program Sido Resik, peneliti memilih desa ini sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwasanya peran multi-aktor sangat penting yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pemerintah Desa Kedungcangkring dan seluruh lapisan masyarakat Desa Kedungcangkring dalam upaya revitalisasi sungai di Desa Kedungcangkring, Kabupaten Sidoarjo. Salah satu studi terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah jurnal yang berjudul “Implementasi *Good Enviromental Governance* dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Bengkulu”. Penelitian ini ditulis oleh Harmiati, Henny Aprianty, Supriyono, Deni Triyanto dan Alexsander dengan tujuan untuk menganalisis implementasi *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bengkulu karena ketidakjelasan konsep dalam pengelolaan yang terpadu dan kurangnya sinergi antara para pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bengkulu belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Good Environmental Governance*. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah rendahnya partisipasi *stakeholder*, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terkini yakni terletak pada fokus dan lokus. Pada penelitian terdahulu lokus diambil di Daerah Aliran Sungai Bengkulu, yang mencakup wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Kedungcangkring, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian fokus penelitian terdahulu adalah mengidentifikasi hambatan dalam mengimplementasikan prinsip *Good Environmental Governance* di Daerah Aliran Sungai Bengkulu, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran dari multi-aktor dalam revitalisasi sungai dengan prinsip *Good Environmental*

Governance melalui program Sido Resik. Peninjauan penelitian ini mengacu pada teori prinsip *Good Environmental Governance* menurut (Faisah & Prianto, 2015) yang menyebutkan terdapat 3 indikator yakni partisipasi, aturan hukum, dan transparansi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pemerintah Desa Kedungcangkring dan seluruh lapisan masyarakat Desa Kedungcangkring memegang peranan penting dalam kemajuan dan pelaksanaan program Sido Resik di Desa Kedungcangkring. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang Desa Kedungcangkring raih yakni menduduki juara pertama pada pelaksanaan program Sido Resik putaran kedua dan menjadi representasi serta memenangkan ajang *Innovation Government Award* (IGA) tahun 2024 yang menjadikan Kabupaten Sidoarjo mendapat penghargaan Kabupaten Terinovatif tahun 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran multi-aktor, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Kedungcangkring, dan masyarakat Desa Kedungcangkring, dalam mendukung keberhasilan program revitalisasi sungai yang sejalan dengan prinsip *Good Environmental Governance* melalui inisiatif seperti program Sido Resik di Kabupaten Sidoarjo. Dalam konteks ini, *Good Environmental Governance* menekankan pentingnya partisipasi multi-aktor, transparansi antar multi-aktor dan adanya aturan hukum yang mengikat multi-aktor. Kolaborasi dan kerja sama antara berbagai pihak menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, yang tidak hanya memastikan keberhasilan program revitalisasi sungai tetapi juga

mendukung peralihan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Mengacu pada isi dari latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Good Environmental Governance dalam Revitalisasi Sungai melalui Program Sido Resik di Desa Kedungcangkring, Kabupaten Sidoarjo”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan adanya latar belakang diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut ***“Bagaimana Good Environmental Governance dalam revitalisasi sungai melalui Program Sido Resik di Desa Kedungcangkring, Kabupaten Sidoarjo”***.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan peran multi-aktor sesuai dengan prinsip *Good Environmental Governance* dalam revitalisasi sungai melalui Program Sido Resik di Desa Kedungcangkring, Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *Good Environmental Governance*, khususnya dalam *Good Environmental Governance* dalam revitalisasi sungai melalui Program Sido Resik di Desa Kedungcangkring, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *Good Environmental Governance*, serta terkait peran multi-aktor sesuai dengan prinsip *Good Environmental Governance* dalam revitalisasi sungai.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah serta memperdalam pengetahuan penulis terkait *Good Environmental Governance* dalam revitalisasi sungai melalui Program Sido Resik di Desa Kedungcangkring, Kabupaten Sidoarjo.

b. Bagi Desa Kedungcangkring, Kabupaten Sidoarjo

Sebagai bahan pertimbangan, masukan dan evaluasi sejauhmana efektivitas revitalisasi sungai melalui program Sido Resik di Desa Kedungcangkring, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan prinsip *Good Environmental Governance*.

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk diskusi serta sebagai acuan bagi peneliti lain yang memiliki bidang studi yang relevan dengan kajian serupa yakni Administrasi Publik di masa yang akan mendatang, serta menambah referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik.